

Penyuluhan Pengembangan Kesejahteraan Ditinjau dari Komposisi Kependudukan di Kota Balikpapan

Welfare Development Counseling Reviewed from the Population Composition in Balikpapan City

Muliati¹, Emmilya Umma Aziza Gaffar², Yesi Aprianti³, Auliansyah⁴,
Indra Cahyana⁵, Andra Sulindrina⁶✉

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

³Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

⁴Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

⁵Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

⁶Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: andra@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penyuluhan ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada Pemerintah terkait komposisi penduduk sebagai bentuk persiapan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Sehingga indikator keberhasilan adalah pemahaman kondisi dan teori kependudukan untuk diaplikasikan pada program kesejahteraan penduduk. Pemerintah memiliki persiapan, dapat menghimpun data kependudukan. Hasil penyuluhan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah melakukan kordinasi lintas OPD untuk menghimpun data dan pelaksanaan program. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan Perencanaan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, mengacu kepada dokumen RTKK (Rencana Ketenagakerjaan Kota) yang menggambarkan secara lengkap data dan kebijakan ketenagakerjaan. Pemetaan tenaga kerja dilakukan dengan melihat komposisi ketenagakerjaan di Kota Balikpapan tersedia dari level non sarjana.

Abstract

This counseling aims to provide socialization to the Government regarding the composition of the population as a form of preparation in the formulation of employment policies. So that the indicator of success is the understanding of population conditions and theory to be applied to the population welfare program. The government is preparing to collect population data. The results of counseling at the Balikpapan City Employment Service have coordinated across OPDs to collect data and program implementation. The Balikpapan City Manpower Office carries out Employment Planning in Balikpapan City, referring to the RTKK (City Employment Plan) document which fully describes employment data and policies. Manpower mapping is done by looking at the composition of the workforce in Balikpapan City, available from the non-graduate level.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Muliati, Emmilya Umma Aziza Gaffar, Yesi Aprianti, Auliansyah, Indra Cahyana, Andra Sulindrina.

Article history

Received 2025-03-18

Accepted 2025-05-20

Published 2025-06-30

Kata kunci

Penyuluhan Struktur Kependudukan; Kemiskinan; Penyerapan Tenaga Kerja.

Keywords

Extension of Population Structure; Poverty; Labor Absorption.

1. Pendahuluan

Pengembangan wilayah merupakan upaya mengkombinasi secara harmonis sumber daya alam, manusia, teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri. Konsep pembangunan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antarwilayah. Pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan yang mencakup aspek-aspek pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi alam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Dengan demikian dalam jangka panjangnya wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penduduk merupakan modal dasar pembangunan suatu wilayah (Fuady, 2020). Mengembangkan kesejahteraan penduduk merupakan upaya meningkatkan pengembangan wilayah. Penduduk dipandang sebagai sumber daya untuk mengelolah potensi wilayah. Cara mencapainya bersandar pada kemampuan SDM dalam memanfaatkan lingkungan sekitar dan daya tampungnya serta kemampuan memanfaatkan instrumen yang ada. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan kebijakan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang dihadapi, yang dapat diupayakan melalui pemanfaatan *resources* diantaranya yaitu dengan mengendalikan komposisi penduduk yang tumbuh begitu cepat. Diperlukan ekuilibrium percepatan pertumbuhan manusia dan pengelolaan sumber daya. Apabila konsep tersebut diterapkan maka akan mendorong terciptanya kemajuan dan manfaat yang besar terhadap masyarakat.

Pengembangan kesejahteraan penduduk merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia salah satunya Provinsi Kalimantan Timur. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibukota negara menjadi warna baru bagi Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, sosial, dan pemerataan pembangunan di Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019). IKN Nusantara akan berdampak pada pertumbuhan penduduk secara tidak alamiah. Diperkirakan akan terdapat sebanyak 1.7-1.9 juta jiwa masuk ke Kalimantan Timur (Gani et al., 2022). Kota Balikpapan adalah wilayah yang akan terkena dampak pertambahan penduduk tersebut. Dalam mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan pembangunan, Kota Balikpapan perlu mengetahui kondisi, perkiraan dampak dan pengembangan potensi wilayah yang dimiliki.

Disisi lain, Kota Balikpapan merupakan salah satu kota penyangga Ibukota Negara di Provinsi Kalimantan Timur yang masih mengalami pengembangan kesejahteraan wilayah. Balikpapan merupakan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Kalimantan Timur. Data BPS 2021 menginformasikan bahwa secara rata-rata persentase kemiskinan di kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebesar 7.47%. Sedangkan presentase kemiskinan di Kota Balikpapan 2021 sebesar 2.89. Hal ini mengindikasikan adanya kesejahteraan penduduk di kota tersebut.

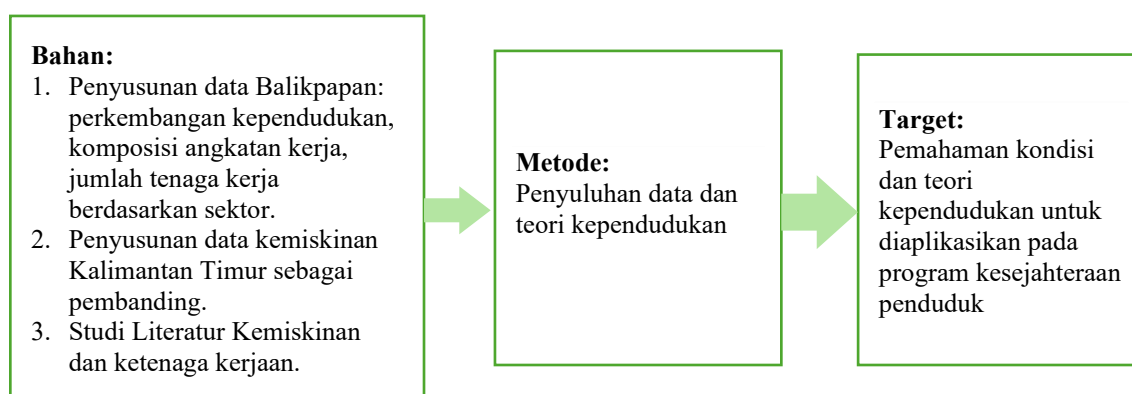
Selain dari tingkat kemiskinan, Kota Balikpapan juga memiliki potensi SDA untuk memajukan pariwisata. Kota Balikpapan masuk dalam kota Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata (Hakim et al., 2020). Pemerintah Kota Balikpapan juga menetapkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Primer yang melayani wilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan bagian utara dengan wilayah internasional serta wilayah Kalimantan bagian timur dengan wilayah nasional. Kota Balikpapan memiliki fungsi kegiatan sebagai pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan regional, pusat industri, pusat transportasi udara internasional, dan pusat pengolahan migas. Dari penetapan RTRW tersebut maka arah dan strateginya mengarah ke kawasan Perdagangan dan Jasa Regional serta Industri Pengolahan sebagai faktor elemen pembentuk ruang. Hal ini berdampak pada munculnya tantangan dan kesiapan bagi pemerintah terkait aspek komposisi penduduknya dalam pengembangan wilayah dan menyokong IKN. Dimana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayahnya masih membutuhkan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan untuk terus meningkatkan kemajuan komposisi penduduknya. Kota Balikpapan perlu untuk mengendalikan berbagai aspek komposisi penduduk dalam berbagai hal yang meliputi kemiskinan, pengangguran, dan kependudukannya serta dibutuhkan strategi pengembangan untuk mencapainya.

Menyikapi kondisi tersebut, SDM di Kota Balikpapan perlu dikeloah dan diarahkan untuk pengembangan wilayah pengangga IKN. Pengelolah SDM yang ada diwilayah adalah pada kordinasi Dinas Ketenagakerjaan. Pengambil kebijakan perlu memahami kondisi ketenaga kerjaan, teori kependudukan, dan tantangan SDM diwaktu yang akan datang untuk dapat membentuk program kesejahteraan penduduk. Hal ini menjadi dasar analisis dan pengembangan kesejahteraan ditinjau dari komposisi kependudukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi teoritis mengenai kebijakan kependudukan dan menerima informasi kebijakan empiris Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam tatakelola kependudukan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada fenomena kesejahteraan masyarakat yang dapat dikendalikan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, dan dengan adanya struktur kependudukan Kota Balikpapan dimana pada tahun 2021, BPS mencatat sekitar 70% penduduk Kota Balikpapan berada pada kategori penduduk usia kerja namun hanya sekitar 60% dari rasio tersebut yang terserap kedalam pasar kerja. Kesejahteraan masyarakat diproyeksikan oleh data kemiskinan, sedangkan kependudukan diproyeksikan oleh data jumlah penduduk, persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, dan angkatan kerja di Kota Balikpapan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan pada tanggal 26 Oktober 2022. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan struktur kependudukan penduduk Kota Balikpapan dan proyeksi lonjakan penduduk dalam menyokong IKN Nusantara. Tujuan kegiatan penyuluhan adalah memberikan informasi teoritis kebijakan kependudukan dan menerima informasi kebijakan empiris Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dalam tatakelola kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan OPD terkait memiliki rencana program berbasis data empiris dan berlandaskan teori kependudukan. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Secara visual, program dan target kegiatan digambarkan sebagai berikut.

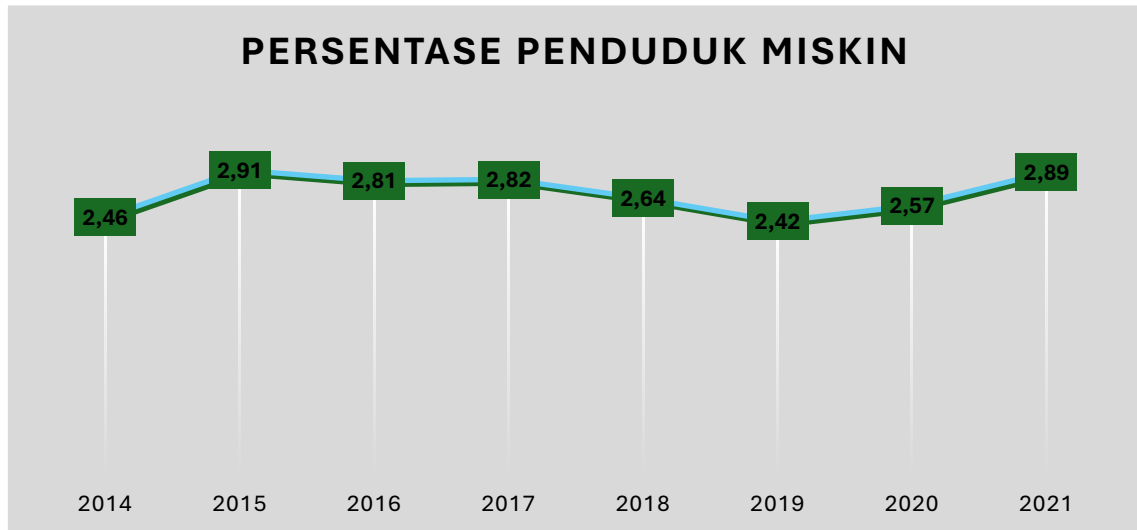


Gambar 1. Alur Kegiatan

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan kesejahteraan berdasarkan komposisi penduduk di Kota Balikpapan dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2022. Kunjungan pada Dinas Ketenagakerjaan bertujuan untuk menambah wawasan teoritis pemangku kepentingan dan pengumpulan informasi kependuduk. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah memiliki sistem yang baik dalam menghimpun data, (Yusuf, 2022) melakukan pengembangan SIKUTA. Dimana tersedia pengisian buku tamu elektronik. Selanjutnya, diskusi dilakukan untuk membahas kesejahteraan di Kota Balikpapan.

Kesejahteraan daerah dapat diukur dengan berbagai pendekatan, misalkan pendapatan, daya beli, kondisi masyarakat dan/atau pembangunan manusia. Pendekatan kesejahteraan yang kami lakukan adalah dengan melihat kemiskinan daerah, dengan asumsi semakin sedikit jumlah penduduk miskin maka semakin baik kesejahteraan daerah tersebut. Kemiskinan di Kota Balikpapan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur. Selama beberapa periode, nilai presentase penduduk miskin berkisar 2% dari total penduduknya. Secara visual, kemiskinan di Kota Balikpapan disajikan sebagai berikut.

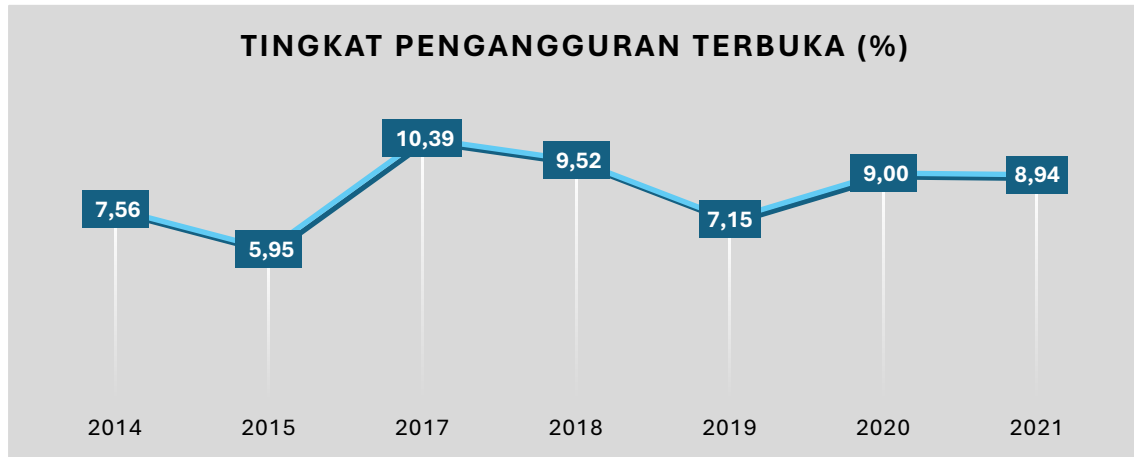


Gambar 2. Presentase Penduduk Miskin Di Kota Balikpapan 2014-2021

Sumber: Kota Balikpapan dalam angka 2014-2021, BPS

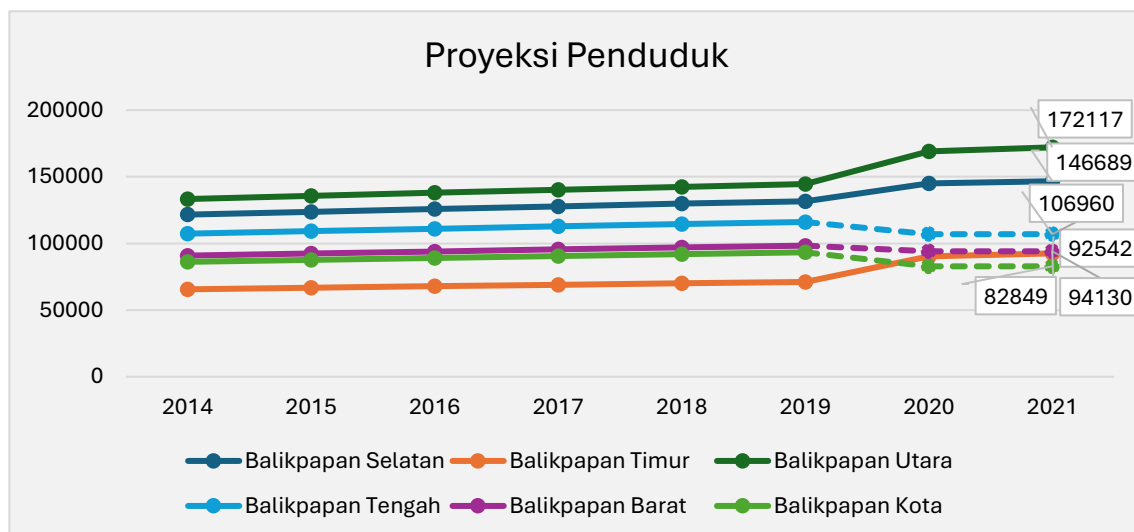
Kemiskinan merupakan suatu kondisi permasalahan yang dapat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor ekonomi dan sosial yang berkaitan satu sama lain, misalnya rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendidikan, redahnya kemampuan untuk mengakses barang dan jasa, kondisi lokasi geografis, dan berbagai hal lainnya. Berdasarkan infoemasi pada Gambar 2. Presentase Penduduk Miskin di Kota Balikpapan 2014-2021 menunjukkan bahwa, tren kemiskinan yang cenderung tetap. Artinya, penambahan penduduk di Balikpapan berdampak sama dengan persentase penduduk miskin. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebesar 2.46% naik menjadi 2.91% di tahun 2015 yang merupakan presentase kemiskinan tertinggi selama periode pengamatan. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan di Kota Balikpapan. Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Kami memperkirakan hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19. Pada tahun 2012, presentase kemiskinan di Kota Balikpapan mencapai 2.89%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar lebih dari 97% penduduk di Kota Balikpapan mampu memenuhi kebutuhan hariannya atau berada pada kategori sejahtera. Selain itu, upah minimum kota telah diberlakukan di Kota Balikpapan yang mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Regulasi tersebut, memberikan jalan tengah terhadap tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh, dimana telah terdapat formulasi perhitungan UMK. UMK kota Balikpapan lebih tinggi dari UMP, hal ini menjadi penyebab penurunan tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan.

Kemiskinan bukan hanya merupakan masalah kemampuan ekonomi, namun juga kegagalan seseorang untuk mencukupkan hak-hak dasar sebagai kebutuhan hidup. Melihat kemiskinan dari kemampuan ekonomi, akan erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Urbanisasi merupakan penyebab kemiskinan (Saidy & Hidayah, 2018). Dengan asumsi, jika suatu wilayah memiliki tingkat pengangguran yang rendah maka hal ini berkorelasi positif dengan kemiskinan. Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk di Kota Balikpapan disajikan sebagai berikut.



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Balikpapan
Sumber: Kota Balikpapan dalam angka 2014-2021, BPS

Pengangguran terbuka merupakan presentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja itu sendiri. Artinya nilai ini menunjukkan seberapa besar jumlah penduduk usia produktif yang tidak memiliki pendapatan untuk membiayai konsumsinya. Di Kota Balikpapan, TPT tertinggi pada tahun 2017, nilai ini cenderung mengalami penurunan. Namun, sama halnya dengan kemiskinan, jumlah presentase pengangguran naik pada pandemi covid-19 di tahun 2020 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 8.94%. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, pada Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Berdasarkan informasi dinas Ketenagakerjaan, terjadi peningkatan penduduk di Balikpapan juga disebabkan oleh masuknya migrasi. Namun hal tersebut tidak menjadi ancaman penambahan TPT karena migrasi yang masuk cenderung disebabkan karena telah mendapat pekerjaan di kota tersebut.



Gambar 4. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Balikpapan
Sumber: Kota Balikpapan dalam angka 2014-2021, BPS

Meningkatkan kesejahteraan daerah dengan mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan dengan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait (Saidy & Hidayah, 2018). Misalnya Dinas sosial bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa kurang mampu. Atau pun kerjasama dibidang kesehatan, ketenagakerjaan, peningkatan kemampuan UMK dan program pemerintah daerah lainnya. Diperlukan rencana strategis dan evaluasi untuk memformulasikan program kerja antar pemerintah daerah (Debby Intan Suci Rahmawati, 2022). Lebih kompleks, (Maifizar, 2018) melihat karakteristik kemiskinan di Aceh dengan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Diperlukan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah daerah, lembaga swasta dan tokoh masyarakat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan.

Implementasi koordinasi antara OPD telah dilaksanakan di Balikpapan. Di Kota Balikpapan, Dinas ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama dengan dukcapil untuk menghimpun data-data kependudukan. Data tersebut juga dijadikan dasar penyebaran informasi dari permintaan dan penawaran tenaga kerja. Misalkan pada data penduduk masuk (migrasi) yang cukup tinggi. Data tersebut telah terintegrasi dengan sistem Dirjen Dukcapil sehingga bisa diakses kapan saja. Sistem ini mengakumulir mengurus surat perpindahan secara online secara langsung untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Merespon tingginya penduduk yang masuk, maka pemerintah memberlakukan kebijakan bahwa adanya “uang jaminan” untuk tiket pemulangan jika dalam kurun waktu tertentu belum mendapat pekerjaan. Kebijakan ini mampu mengurangi angka pengangguran oleh komposisi penduduk tidak alami (migrasi). Namun kebijakan ini tidak dapat diberlakukan lagi. Mengingat migrasi yang masuk di Kota Balikpapan sebagian besar adalah penduduk yang telah memiliki kerja.



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan

Menjaga tingkat kesejahteraan pada wilayah Kota Balikpapan, Disnaker terus bekerja sama dengan lintas OPD. Kerjasama yang dimaksud adalah pengumpulan data dan program kerja dengan DKUM Balikpapan, Dinas Sosial dan lainnya. Pada DKUM dihimpun data UMKM, perdagangan, usaha mikro dan lainnya bagi pekerja sektor informal. Kolaborasi juga dilakukan dengan DPMPT (Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu) Balikpapan untuk pelaksanaan *Job Market Fair*. Hal ini membuka kesempatan kerja secara umum di Kota Balikpapan baik dari lulusan sarjana dan non sarjana. Untuk tenaga kerja non sarjana, Dinas Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (SMK) untuk melakukan penyerapan tenaga kerja dengan spesifikasi pada bidang tertentu. Misalkan pada SMK 1 Kota Balikpapan dimana lulusannya paling cepat terserap pada pasar tenaga kerja pada bidang otomotif.

Dinas ketenagakerjaan Balikpapan berkordinasi dengan Dinas Sosial untuk data dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Walaupun pemenuhan kuota kerja bagi penyandang disabilitas

belum mencapai kondisi terserap penuh (Suhadi, 2018). Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan berkordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang dan himbauan untuk tetap membuka permintaan tenaga kerja bagi penduduk disabilitas.

Perencanaan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, mengacu kepada dokumen RTKK (Rencana Ketenagakerjaan Kota) yang menggambarkan secara lengkap data dan kebijakan ketenagakerjaan dengan periode 5 tahun. Pemetaan tenaga kerja dilakukan dengan melihat komposisi ketenagakerjaan di Kota Balikpapan tersedia dari level non sarjana. Memperkuat penyerapan tenaga kerja pada sektor formal dilakukan dengan edukasi dan pembinaan kepada perusahaan terutama terkait regulasi ketenagakerjaan terbaru. Disnaker juga memiliki program BKK (Bursa Kerja Khusus), hal ini diimplementasikan dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk membuka lowongan pekerjaan khusus. Pencari kerja juga direkomendasikan memiliki kartu kuning. Kartu kuning yang menjadi salah satu syarat mencari pekerjaan sangat membantu dalam hal pelaporan tenaga kerja yang masih mencari dan sudah bekerja.

4. Simpulan

Tingkat kesejahteraan Kota Balikpapan relatif memadai, dimana kemiskinan di Kota Balikpapan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Timur. Nilai tersebut sejalan dengan rendahnya tingkat pengangguran di Kota Balikpapan. Kondisi ini mempermudah fungsi Disnaker dalam memetakan angkatan kerja ke dalam pasar kerja. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan telah melakukan koordinasi lintas OPD untuk menghimpun data dan pelaksanaan program. Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan melakukan Perencanaan ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, mengacu kepada dokumen RTKK (Rencana Ketenagakerjaan Kota) yang menggambarkan secara lengkap data dan kebijakan ketenagakerjaan. Pemetaan tenaga kerja dilakukan dengan melihat komposisi ketenagakerjaan di Kota Balikpapan tersedia dari level non sarjana.

Daftar Pustaka

- Debby Intan Suci Rahmawati, E. Y. (2022). Manajemen Strategi Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7134027>
- Fuady, D. H. (2020). RUMAH DATAKU: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN DI KAMPUNG KB. *Indonesian Journal of Education and Community Services*, 1(2), 3.
- Gani, I., Auliansyah, A., Gaffar, E. U. A., Muliati, M., Aprianti, Y., Rachmadi, R. F. R., & Agustina, N. I. (2022). Makassar Strait Area Development in Indonesia Based on the Marine Economy Sector. *Economies*, 10(8), 195. <https://doi.org/10.3390/economies10080195>
- Hakim, F. A., Banjarnahor, J., Purwanto, R. S., & Rahmat, H. K. (2020). PENGELOLAAN OBYEK PARIWISATA MENGHADAPI POTENSI BENCANA DI BALIKPAPAN SEBAGAI PENYANGGA IBUKOTA NEGARA BARU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 607–612. <https://doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.607-612>
- Maifizar, A. (2018). KARAKTERISTIK DAN FENOMENA KEMISKINAN KELUARGA MISKIN PEDESAAN DI ACEH. *Jurnal Community*, 2(3). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v2i3.98>
- Saidy, E. N., & Hidayah, N. (2018). FENOMENA KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 43–59. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a2>
- Suhadi dan Ayu Riani (2018). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Memperoleh Pekerjaan Di Kota Balikpapan. *Jurnal de Jure*. Volume 10 No. 1 Januari 2018.
- Yusuf, M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Buku Tamu Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan. Program Studi Sistem Informasi, Institut Teknologi Kalimantan.